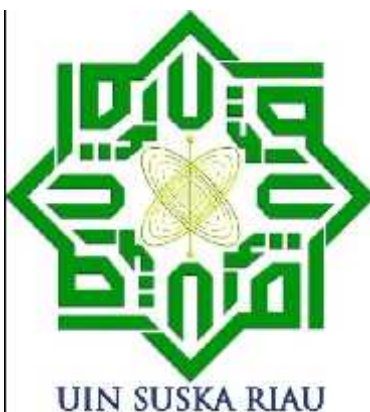


**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR
PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN/KOTA
(STUDI DI KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

DONNY OSMOND
10827002848

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2013**

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi kebijakan otonomi pendidikan di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dan apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan otonomi bidang pendidikan di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.

Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini diantaranya : untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan otonomi pendidikan di Kabupaten Siak terutama di Kecamatan Sabak Auh dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tersebut.

Adapun sumber data yang dipakai yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik analisa data yang dipakai bersifat deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan wawancara. Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penulisan deduktif.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa kebijakan otonomi merupakan kebijakan yang paling di tunggu-tunggu oleh bangsa indonesia, tidak terkecuali kebijakan otonomi dalam bidang pendidikan. Dengan kebijakan ini pemerintah daerah mempunyai wewenang yang luas untuk meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah. UU No. 32 Tahun 2004 beserta peraturan-peraturan pendukung lainnya memberikan kewenangan pemerintahan bidang pendidikan yang selama ini berada di pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota. Implementasi kebijakan otonomi bidang pendidikan di Kabupaten Siak khususnya di Kecamatan Sabak Auh masih belum berjalan secara maksimal karena dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai hambatan antara lain masalah peraturan perundang-undangan, masalah sarana dan prasarana yang belum terpenuhi dan masalah koordinasi antar lembaga yang terkait dengan dunia pendidikan.

KATA PENGANTAR



Pertama-tama tiada kata yang pantas kita ucapkan selain dengan kata sedalam Puji dan Syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang selalu memberikan nikmat-Nya, apalagi nikmat kemampuan dan kesehatan bagi penulis selama dalam penulisan skripsi ini. Kedua kalinya sholawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar kita yang telah berjuang dan membawa kita untuk mengenal jalan kebenaran. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota (Studi Di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis dengan hati terbuka mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan sehingga selesainya pembuatan skripsi ini, terutama kepada:

1. Ayahanda tercinta Nurdin yang telah berjuang dan memberikan motivasi untuk keberhasilan ananda, serta Ibunda Hafsah yang senantiasa mendo'akan ananda, sehingga ananda sampai pada perguruan tinggi.

2. Kakak-kakak ku Budiman, Herry Kiswanto, Ria Irawati, Ricky Raharjo Dan Cannavaro Adrevi Putra yang selalu memberikan dorongan serta semangatnya.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir Karim selaku Rektor UIN Suska Riau beserta staf-stafnya.
4. Bapak Dr. Akbarizan, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
5. Ibu Hertina M. Pd, selaku Pembantu Dekan I.
6. Hj. Nuraini Sahu, SH. MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
7. H. Maghfirah, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
8. Bapak Syafrinaldi, SH. MA, selaku Penasehat Akademis penulis.
9. Bapak Mohd. Kastulani, SH. MH, selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tak pernah bosan memberikan arahan kepada penulis.
10. Seluruh Dosen dan Karyawan/ti UIN SUSKA, khususnya Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
11. Bapak Kepala Dinas pendapatan beserta karyawan yang telah sudi dan ikhlas membantu penulis dalam mengumpulkan data yang penulis butuhkan.
12. Teman-teman seperjuangan khususnya lokal 2 Ilmu Hukum angkatan 08 Joko Supriyanto, Teguh Budiyanto, Dasuki dan yang lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, karna tanpa suka duka , emosi dan tawa kita bersama semua ini hanya biasa saja terima kasih karna selalu

memberikan sumbangan pikiran kepada penulis untuk selesainya skripsi ini.

13. Buat temen kos diparadise B-23 Fatkhul Fahimi, Yudis Wiransyah, ucapan terima kasih karena kalian telah banyak memberi masukan serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mudah-mudahan Allah SWT membalas amal kebaikan kepada mereka mudah-mudahan skripsi ini banyak manfaatnya bagi kita semua Amin

Pekanbaru, 28 Januari 2013

Penulis,

DONNY OSMOND

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penelitian	16
 BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	 17
A. Sejarah Berdirinya Dinas Pendidikan Kabupaten Siak	17
B. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Siak	17
C. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Siak	23
D. Tujuan dan Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Siak	26
 BAB III : TINJAUAN PUSTAKA	 33
A. Sejarah Otonomi Daerah	33
B. Pengertian Otonomi Daerah	39
C. Otonomi Bidang Pendidikan	40
D. Reformasi Pendidikan Di Indonesia.....	45
 BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 49
A. Implementasi Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak ..	49
B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.....	59

BAB V	: PENUTUP	73
	A. Kesimpulan.....	73
	B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		76

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Otonomi Daerah merupakan isu menarik bila diamati perkembangannya khususnya di Indonesia, karena semenjak para pendiri negara menyusun format negara, isu menyangkut pemerintahan lokal telah diakomodasikan dalam UUD 1945 Pasal 18 beserta penjelasannya. Pemerintah Daerah dalam pengaturan Pasal 18 UUD 1945 sebenarnya telah mengakui adanya keragaman dan hak asal-usul daerah yang merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia.¹

Proses peralihan dari sistem dekosentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah. Tujuan otonomi adalah mencapai efektifitas dan efesiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.²

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan megurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³

Di dalam negara kesatuan, otonomi daerah lebih terbatas daripada di negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah

¹ J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002), h. 1

² HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2007), h. 17

³ Indonesia, *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta, Visimedia, 2009), h. 4

tangga daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat.

Menurut pasal 10 Ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004⁴ Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

1. Politik luar negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Yustisi
5. Moneter dan fiskal nasional;
6. Agama.”

Eksistensi pemerintah daerah begitu urgen khususnya dalam negara yang menganut dalam negara yang menganut sistem negara kesatuan. Seperti halnya negara Indonesia yang mempunyai wilayah yang; sangat luas, dengan konsentrasi-konsentrasi penduduk di wilayah negara tertentu yang masyarakatnya sangat heterogen, baik ditinjau dari aspek etnis, agama, budaya maupun latar belakang kehidupan di bidang ekonomi dan lain sebagainya.⁵

Selain heterogenitas yang sedemikian itu setiap wilayah memiliki kandungan sumber daya alam yang beragam. Persoalannya bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Apakah segala sesuatunya harus diatur dari pusat. Hal itu jelas tidak mungkin sehingga

⁴ *Ibid*, h. 10.

⁵H.A.W Widjaja, *Op cit*, h. 9.

diperlukan penyerahan kewenangan urusan kepada daerah yang dalam ilmu pemerintahan disebut desentralisasi dan dekosentrasi atau tugas pembantuan.

Pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diperbarui dengan UU No. 12 Tahun 2008 secara tidak langsung mengharuskan pemerintah daerah mengembangkan wilayahnya kedalam suasana yang lebih kondusif dan mempunyai wawasan yang lebih demokratis. Termasuk di dalamnya berbagai kemungkinan pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan, karena pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 tersebut menuntut adanya perubahan pengelolaan bidang pendidikan yang bersifat sentralistik kepada yang lebih desentralistik.

Desentralisasi sering digambarkan berkenaan dengan empat tingkat penyerahan kewenangan: dekosentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi. Meski ada variasi yang patut di pertimbangkan dalam praktek sebenarnya.⁶ Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakekatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih sejahtera.⁷

Desentralisasi dan otonomi berarti pemerintah lebih banyak memberikan kepercayaan dan pemberdayaan kepada daerah agar mampu berperintahan dan berotonomi mengatasi persoalan daerahnya.⁸

⁶ Achmad Syahid, *desentralisasi pendidikan*, (Ciputat, Logos Wacana Ilmu, 2003), h. 6

⁷ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), h. 9

⁸ Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi*, (Jakarta, Kencana, 2009), h. 12

Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah, adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang akan menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional.⁹

Sejak awal pemerintahan hingga tahun 2000 sistem pemerintahan dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan menggunakan paradigma sentralisasi, bahwa pemerintah pusat mendominasi perihal perencanaan, implementasi dan evaluasi kinerja pemerintah dan pembangunan. Pemerintah pusat menjadi peran utama yang menentukan orientasi dan tujuan berbagai kebijakan pendidikan.¹⁰

Undang-undang tentang otonomi daerah memberikan kewenangan sebagian besar pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang selama ini berada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Kabupaten/Kota). Jadi, pemerintah kabupaten dan kota perlu memilah dan memilih secara hati-hati berbagai strategi pembangunan pendidikan.¹¹

Desentralisasi bidang pendidikan merupakan suatu keharusan seiring dengan perkembangan dan tantangan dunia pendidikan dewasa ini yang menghendaki pencapaian standar kompetensi dalam berbagai aspek. Menurut

⁹ H.A.W. Wijaya, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2002), h. 3

¹⁰ M. Sirozi, *Politik Pendidikan*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2007), h. 229

¹¹ Kadi Dkk, *Otonomi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah*, (Ponorogo, STAIN PO Press, 2009), h. 22

Tilaar¹² “ada 3 (tiga) hal yang berkaitan dengan urgensi desentralisasi pendidikan, yaitu a) pembangunan masyarakat demokrasi; (b) pengembangan social capital; dan (c) peningkatan daya saing bangsa. Ketiga hal tersebut sudah lebih dari cukup untuk dijadikan alasan mengapa desentralisasi pendidikan harus dilakukan oleh bangsa Indonesia”.

Dasar pertimbangan urgennya kemandirian dalam bidang pendidikan tersebut dapat dilihat dalam pasal 11 Ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.”¹³

Adapun urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten/Kota di sebutkan dalam pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004¹⁴ yang berbunyi:

- (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:
 - a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. Penanganan bidang kesehatan;
 - f. Penyelenggaraan pendidikan;
 - g. Penanggulangan masalah sosial;
 - h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. Pengendalian lingkungan hidup;
 - k. Pelayanan pertanahan;
 - l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;

¹² H.A.R Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional*, (Jakarta, Rineka Cipta), 2002, h. 20

¹³ Undang-undang No.32, *Op Cit*, h. 12

¹⁴ Undang-undang No.32, *Op Cit*, h. 13

- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. Pelayanan adminidtrasi penanaman modal;
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peratran perundang-undangan.

Konsekuensinya adalah melalui hak otonomi yang dilimpahkan secara nyata, luas dan bertanggung jawab tersebut, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangga daerah bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah bersangkutan. Dengan perkataan lain, daerah diberi kekuasaan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan urusan pendidikan yang didasarkan atas kebutuhan nyata daerah akan pendidikan serta kemampuan daerah dari segi aspek sumber daya manusianya, sarana dan prasarana, anggaran dan lain sebagainya.

Mengenai sarana dan prasarana dalam dunia pendidikan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 45 ayat (1) disebutkan “setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik”

Sejalan dengan peraturan tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam hal sarana dan prasarana diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010¹⁵ Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota Pasal 2 Ayat (2) huruf b.3 sampai b.4 yang berbunyi

¹⁵Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 15 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota

3. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (*globe*), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
4. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;

Kebijakan pemerintah memberikan hak otonominya kepada daerah untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangga daerah bidang pendidikan ini seyogyanya disikapi secara bijaksana, dalam artian pihak pemerintah daerah harus berbenah dan mempersiapkan diri yang mencakup segala potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan amanat besar tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa melalui pelimpahan kewenangan dimaksud, maka tentunya daerah bertanggung jawab atau akan dimintai pertanggungjawaban atas maju atau mundurnya pendidikan di daerah bersangkutan.

Implementasi kebijakan pembaruan yang lebih bijak pada tatanan pembangunan pendidikan sungguh sangat berarti, karena fungsi dan peranan pendidikan tersebut sangat strategis dalam pembangunan peradaban masyarakat dan bangsa. Sejarah mencatat bahwa pada organisasi

pendidikanlah kreativitas kader-kader masyarakat dan bangsa dimasa depan dapat dikembangkan.¹⁶

Pendidikan di dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 disebutkan adalah hak dasar kemanusiaan yang harus dapat dinikmati secara layak dan merata oleh setiap masyarakat. Pengertian hak dasar kemanusiaan yang termaktub dalam undang-undang ini merupakan hak asasi yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng semenjak seseorang dilahirkan ke dunia. Hak asasi kemanusiaan ini mengandaikan pemenuhannya hanya bisa dicapai dan terpenuhi dengan perlindungan, penghormatan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Maka Negara sebagai institusi resmi wajib melaksanakannya, memfasilitasi dan meniadakan segala penghalangnya. Untuk itu, pendidikan yang bermutu, semestinya mampu dinikmati oleh semua element masyarakat bangsa Indonesia. Kebijakan pendidikan di Indonesia semestinya mendukung atas terjaminnya hak-hak asasi warganya utamanya dalam hal perolehan pendidikan bermutu khususnya dalam konteks otonomi daerah.

Adanya UU otonomi daerah dan UU perimbangan keuangan pusat-daerah ini semakin membantu dan memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk seluas-luasnya mengelola pendidikan sebaik mungkin. Secara eksplisit kewenangan dan alokasi dana pendidikan ini disebutkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49: “Dana

¹⁶Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), h. 13

pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Otonomi daerah merupakan reformasi politik yang menjanjikan banyak perubahan. Setelah memasuki rentang waktu dasawarsa pertama, otonomi daerah telah melahirkan banyak harapan. Tetapi juga banyak tantangan yang muncul ke permukaan. Persoalan sumber daya tenaga kependidikan, pembiayaan pendidikan, standarisasi kurikulum, bahkan utamanya masalah peraturan dan perundang-undangan kependidikan.¹⁷

Dengan adanya otonomi pendidikan maka kewenangan pemerintah pusat menjadi berkurang dan tidak lagi berhak mencampuri urusan pendidikan daerah, melainkan sebatas memberikan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan persoalan pendidikan tersebut atau lebih tepatnya sebagai fasilitator dan katalisator bukan regulator. Sebaliknya, pemerintah daerah harus mampu menekan dampak negatif yang mungkin timbul dari kebijakan otonomi dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, sehingga amanat yang diberikan berjalan dengan baik dan tercapai tujuan yang diharapkan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Siak disebutkan bahwa “Penetapan kebijakan operasional

¹⁷Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008), h. 5

pendidikan di Kabupaten Siak sesuai dengan kebijakan Nasional dan Provinsi.”¹⁸ Namun secara empiris dan realitas di lapangan harus diakui, bahwa masih ditemui sebagian daerah yang belum siap menerima kewenangan (otonomi) dari pemerintah pusat bidang pendidikan¹⁹. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran yang tersedia maupun kesiapan daerah itu sendiri merupakan faktor yang memungkinkan menyebabkan optimalisasi pelaksanaan otonomi bidang pendidikan masih dipertanyakan.

Sarana dan prasarana serta pendidikan dan tenaga kependidikan yang ada di daerah Kabupaten Siak tepatnya di Kecamatan Sabak Auh, dapat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan otonomi pendidikan. Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, lengkap dan modern serta disisi lain profesionalisme tenaga kependidikan, maka mutu pendidikan yang diharapkan tidak tercapai secara optimal.

Mencermati kondisi demikian tentunya pelaksanaan otonomi bidang pendidikan akan mengalami berbagai hambatan. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merasa berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, dengan menetapkan judul :
“Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota (Studi Di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)”.

¹⁸Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2008

¹⁹Sam M. Chan, Tuti T. Sam, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, (Jakarta Rineka Cipta, 2007), h. 3

B. BATASAN MASALAH

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di persoalkan, maka penulis membatasi penelitian ini pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota Pasal 2 Ayat (2) Huruf b.3 Dan b.4.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota Di Kecamatan Sabak Auh kabupaten Siak?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang penulis harapkan yaitu :

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Dinas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di

Kabupaten/Kota Di Kecamatan Sabak Auh kabupaten Siak di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota Di Kecamatan Sabak Auh kabupaten Siak Di Kecamatan Sabak Auh.

Sedangkan yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang hukum tata negara khususnya dalam bidang otonomi daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan dan juga untuk menambah perbendaharaan hukum tata negara dan disiplin keilmuan yang sehubungan dengan otonomi daerah.
2. Sebagai bahan masukan sederhana bagi pemerintah kabupaten siak dalam hal mengelola kewenangan otonomi khususnya dibidang pendidikan.
3. Untuk menambah informasi ataupun bahan sekunder bagi kalangan akademisi lainnya yang akan melaksanakan penelitian terhadap permasalahan dalam ruang lingkup yang sama.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data

yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuisioner²⁰. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di daerah kabupaten Siak tepatnya di Kecamatan Sabak Auh. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena kecamatan tersebut merupakan salah satu kecamatan yang belum lama berdiri di daerah kabupaten tersebut. Jadi perlu dilihat bagaimana implementasi kebijakan otonomi bidang pendidikan.

3. Populasi dan Responden

Populasi penelitian ini adalah pihak yang terkait dengan pelaksanaan otonomi bidang pendidikan, yaitu Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Siak, Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sabak Auh, dan 8 Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Sabak Auh.

Sampel dalam penelitian ini adalah Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Siak, Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sabak Auh, dan 3 Kepala Sekolah Dasar Negeri di

²⁰*Buku Panduan Akademik (Bimbingan Penyusunan Skripsi)*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU, 2011

ambil dengan menggunakan metode purposive sampling²¹ yaitu pemilihan sekelompok subjek di dasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang diketahui sebelumnya.

4. Sumber Data

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari tempat lokasi penelitian yang berkenaan dengan hal yang diteliti yaitu menggunakan cara wawancara sehubungan dengan permasalahan pokok penelitian tentang pelaksanaan otonomi bidang pendidikan tersebut.

b. Data sekunder

Data pendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku referensi dan literature-literatur yang ada hubungannya dengan topik penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung di lokasi tentang fenomena-fenomena yang terjadi dan yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mencari data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada subjek penelitian.

c. Kajian Pustaka

²¹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung, Pustaka Setia, 2008), h. 179.

Yaitu cara pengumpulan data yang ada hubungannya dengan permasalahan peneliti baik yang didapat dari buku teori, hasil seminar, dan skripsi-skripsi yang mempunyai korelasi terhadap penelitian ini.

6. Metode Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam suatu kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²²

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisa telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

7. Metode Penulisan

- a. Deduktif, mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian dianalisa dan diuraikan secara khusus.
- b. Deskriptif yaitu mengungkapkan uraian atas fakta yang diambil dari lokasi penelitian.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

²²*Ibid*, h. 199.

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari 5 bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri Dari : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Terdiri dari : Sejarah Berdirinya Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Siak.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH

Terdiri dari : Sejarah Otonomi Daerah, Pengertian Otonomi Daerah, Ruang Lingkup Otonomi Daerah, Otonomi Bidang Pendidikan, Reformasi Pendidikan Di Indonesia.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Terdiri dari : Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota, serta Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi.

BAB V PENUTUP

Terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Dinas Pendidikan Kabupaten Siak

Berlandaskan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Siak, maka berdirilah Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, yang terletak di jalan DR. Sutomo (Kantor Kande).¹

Dinas Pendidikan Kabupaten Siak Pertama kali di kepalai oleh Bapak H. Wan Amir. SH Digantikan ke Bapak Drs. H. Kadri Yafis, M.pd. Kemudian Pada Juni tahun 2005 kantor Dinas pendidikan dipindahkan ke Jalan Komplek Perkantoran Tanjung agung, yang dikepalai oleh Bapak Drs. H. Riduan Kadir, SH. MM. pada Februari 2006 diganti lagi, Dinas Pendidikan Kabupaten Siak dikepalai oleh Bapak Drs. Zakaria, pada oktober 2007 hingga September 2011 Dinas Pendidikan Kabupaten Siak Di kepalai oleh Bapak Drs. H. Arfan Usman. M.pd. dan pada bulan Oktober 2011 Dinas Pendidikan Kabupaten Siak Kembali Di Kepalai Oleh Bapak Drs. H. Kadri Yafis, M.pd.

B. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Siak²

Dalam menjalankan tugas pokok Dinas Pendidikan Kabupaten Siak didukung oleh 1 (satu) orang Kepala Dinas dan 1 (satu) orang Sekretaris, dan didukung oleh 4 (empat) orang Kepala Bidang, 12 (dua belas) orang Kepala Seksi, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian dan 14 (empat belas) orang Kepala

¹ <http://disdiksiak.net/indek.php?option>, di akses tanggal 12 Desember 2012

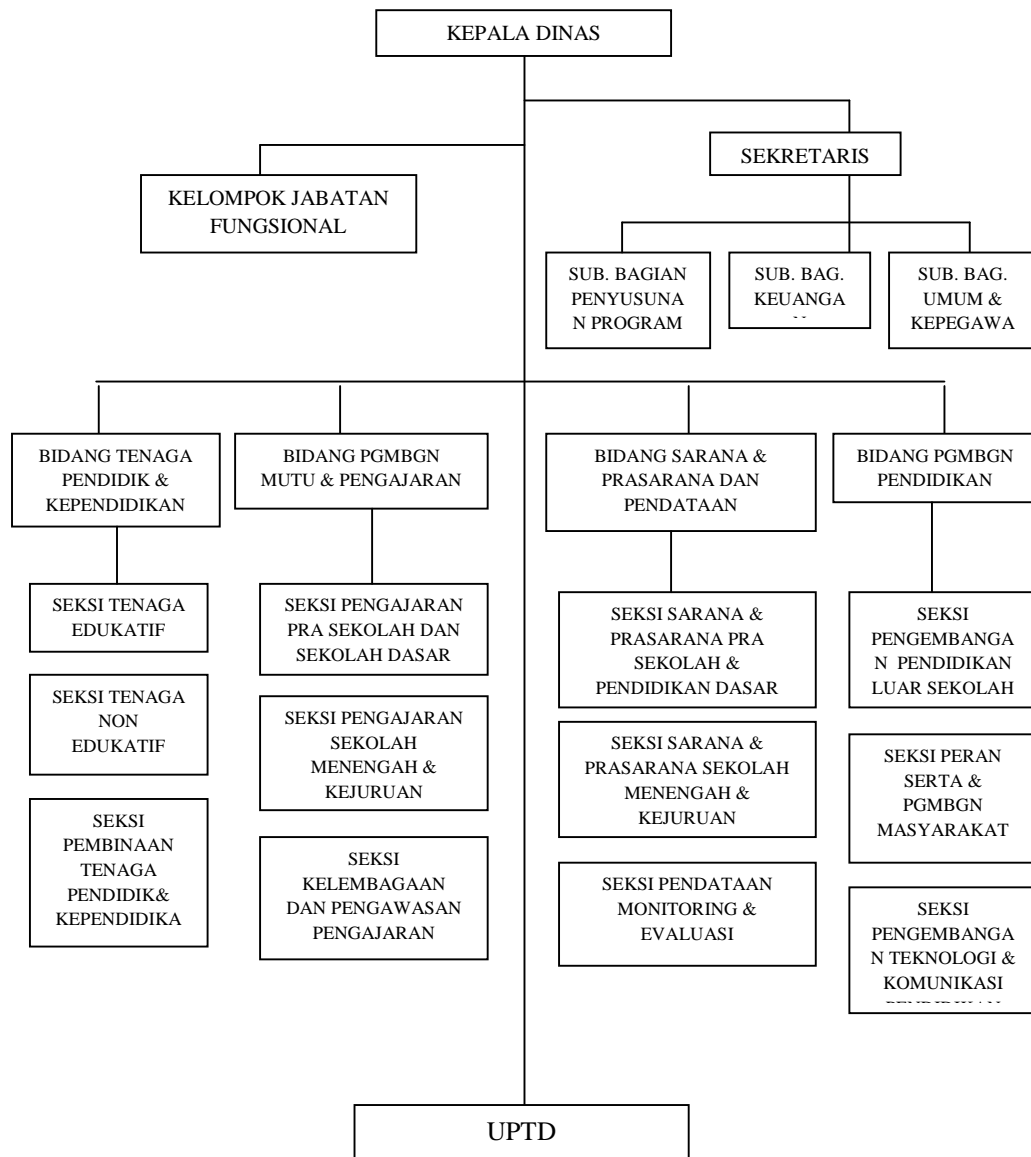
² Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Siak Tahun 2011-2016

Unit Pelaksana Teknis dengan rincian tugas pokok dari masing-masing

Bidang, Bagian, Seksi dan UPT sebagai berikut :

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Siak Berdasarkan Lampiran

Perda Nomor 8 Tahun 2008³



³ Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2008

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan bidang pendidikan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang dalam rangka dekonsentrasi.

2. Sekretaris

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan koordinasi dengan bidang-bidang dalam organisasi, program, keuangan, umum dan kepegawaian.

a. Subbagian Penyusunan Program

Mempunyai tugas menyiapkan serta menyusun rencana program dan kegiatan dibidang pendidikan yang telah ditetapkan oleh kepala dinas.

b. Subbagian Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan peng administrasi di bidang keuangan yang telah ditetapkan oleh kepala dinas.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perlengkapan, tatalaksana dan administrasi kepegawaian yang telah ditetapkan oleh kepala dinas.

3. Bidang Tenaga Pendidik Dan Kependidikan

Mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pengembangan, pembinaan, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan.

a. Seksi Tenaga Edukatif

Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, menyelenggarakan administrasi rencana pengadaan tenaga pendidik, memberikan masukan kepada kepala bidang mengenai kebijakan tentang tenaga pendidik.

b. Seksi Tenaga Non Edukatif

Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan, menyelenggarakan administrasi rencana pengadaan tenaga kependidikan, memberikan masukan kepada kepala bidang mengenai kebijakan tentang tenaga kependidikan.

c. Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembinaan kualitas, penegakan disiplin, tindak lanjut, penerapan sanksi dan penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan.

4. Bidang Pengembangan Mutu Pengajaran

Mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan kegiatan pengembangan, penetapan, penyusunan, pengendalian, pelaksanaan dan penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan peningkatan mutu pengajaran

a. Seksi Pengajaran Pendidikan Dasar

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan, penetapan, penyusunan, pengendalian, pelaksanaan, penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan peningkatan mutu pengajaran TK, SD, SLB;

b. Seksi Pengajaran Pendidikan Menengah Umum Dan Kejuruan

Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, penetapan, penyusunan, pengendalian, pelaksanaan, penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan peningkatan mutu pengajaran SMP, SMPLB, SMA, SMK;

c. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Pengajaran

mempunyai tugas : melaksanakan pengembangan, penetapan, penyusunan, pengendalian, pelaksanaan lembaga pendidikan dan pengawasan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

5. Bidang Sarana Prasarana Dan Pendataan Pendidikan

Bidang sarana prasarana dan pendataan pendidikan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pengembangan, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana, pendataan dan validasi data pendidikan.

a. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar

mempunyai tugas : melaksanakan pengembangan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan dasar, menyelenggarakan administrasi rencana sarana prasarana pendidikan dasar, menyelenggarakan administrasi rencana sarana prasarana pendidikan dasar, memberikan

masukan kepada kepala bidang mengenai kebijakan tentang sarana prasarana pendidikan dasar.

b. Seksi Sarana Prasarana Menengah Umum dan Kejuruan

Mempunyai tugas : melaksanakan pengembangan kualitas dan kuantitas sarana prasarana menengah umum dan kejuruan menyelenggarakan administrasi rencana sarana prasarana menengah umum dan kejuruan memberikan masukan kepada kepala bidang mengenai kebijakan tentang sarana prasarana menengah umum dan kejuruan.

c. Seksi Pendataan Monitoring dan Evaluasi

Mempunyai tugas: melaksanakan pengembangan kualitas dan kuantitas rencana penyelenggaraan administrasi pendataan monitoring dan evaluasi, memberikan masukan kepada kepala bidang sarana prasarana dan pendataan pendidikan.

6. Bidang Pengembangan Pendidikan

Mempunyai tugas : membantu kepala dinas mengembangkan, memantau, mengendalikan dan menilai pelaksanaan pendidikan luar sekolah. Membangun, meningkatkan teknologi dan komunikasi, peran serta masyarakat, menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri.

a. Kasi Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

Mempunyai tugas : membantu kepala bidang mengembangkan, memantau, mengendalikan dan menilai pelaksanaan pendidikan luar sekolah.

b. Seksi Peran Serta Masyarakat

Mempunyai tugas : membantu kepala bidang mengembangkan, memantau, mengendalikan dan menilai pelaksanaan peran serta masyarakat.

c. Seksi Pengembangan Teknologi dan Komunikasi

Mempunyai tugas : membantu kepala bidang mengembangkan, memantau, mengendalikan dan menilai pengembangan teknologi dan komunikasi.

7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan terdiri dari 14 (Empat belas) Kecamatan adalah sebagai berikut : Kecamatan Minas, Siak, Sungai Apit, Tualang, Kerinci Kanan, Dayun, Bunga Raya, Sungai Mandau, Kandis, Lubuk Dalam, Koto Gasib, Sabak Auh, Mempura dan Pusako.

C. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Siak

1. Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Siak

Untuk mengantisipasi berbagai tantangan dan kondisi yang dihadapi oleh pemerintah di daerah Riau terutama menghadapi era global, Pemerintah Propinsi Riau telah merumuskan *Strategi Dasar Riau Menuju Era Baru* yang merupakan komitmen pembangunan daerah secara konseptual yang dituangkan ke dalam Lima Pilar Pembangunan Daerah Riau sehubungan dengan itu dirumuskanlah Visi Pembangunan Propinsi Riau Yaitu: **“Terwujudnya Propinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Batin, di Asia Tenggara Tahun 2020”**. Sedangkan

Misi Pembangunan Propinsi Riau yaitu: **“Mewujudkan masyarakat Riau yang beriman dan bertaqwa, berkualitas, sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi”**, di samping menangani berbagai implikasi yang terkait didalamnya diberbagai bidang.

Strategi kebijakan Propinsi Riau jangka panjang untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Propinsi Riau tahun 2020 tersebut akan dilakukan melalui berbagai upaya yang relevan termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan keagamaan dan pendidikan. Strategi jangka pendek dalam 5 tahun mendatang dikembangkan 5 (lima) Pilar Pembangunan Propinsi Riau, yang meliputi :

- a. Pembangunan dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa;
- b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan;
- d. Pembangunan kesehatan dan olahraga;
- e. Pembahasan dan pengembangan kebudayaan.

Dalam rumusan Visi dan Misi Pembangunan Propinsi Riau tahun 2020 seperti yang dirumuskan di atas, tersirat makna bahwa sumber daya manusia menempati posisi yang amat penting dan strategis. Hanya dengan dimilikinya sumber daya manusia yang berkualitas baik dilihat dari segi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dari segi iman dan taqwa, visi dan misi tersebut akan dapat terwujud. Dalam hal ini sektor pendidikan terutama di Kota Siak memikul beban yang sangat berat untuk mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kualitas penguasaan

ilmu pengetahuan dan teknologinya serta iman dan taqwanya secara menyeluruh tinggi. Sehubungan dengan itu, guna menunjang perwujudan visi dan misi pembangunan Propinsi Riau sebagaimana disebutkan diatas khususnya dalam bidang pendidikan pemerintah Kabupaten Siak telah pula merumuskan visi dan misi pendidikan. Visi tersebut berbunyi : *“Terwujudnya lembaga pendidikan di Kabupaten Siak yang menghasilkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Agamis dan berbudaya melayu serta memiliki daya saing di Propinsi Riau Tahun 2016”*

2. Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Siak

Visi diatas dapat dicapai bila semua jenis dan tingkat pendidikan dapat memberikan pelayanan yang terfokus pada kebutuhan belajar siswa. Secara keseluruhan lembaga pendidikan yang ada harus bekerjasama untuk memastikan tersedianya sumber daya untuk mencapai atau menemukan kebutuhan belajar siswa tersebut. Seluruh fungsi komponen dan kebijakan dalam sistem pendidikan harus direvisi secara teratur sehingga semua komponen dalam pendidikan harus mendukung fokus diatas. Oleh karena itu untuk mencapai visi dimaksud dirumuskan pula misi Pendidikan Kabupaten Siak yang antara lain berbunyi :

KODE	MISI
M1	Mengembangkan sistem pendidikan yang komprehensif dan terpadu berorientasi pada kepuasan pelanggan (customers

	satisfaction)
M2	Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan
M3	Menciptakan lulusan yang beriman, berakhlak mulia, berkualitas dan berdaya saing global
M4	Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh pelayanan pendidikan
M5	Meningkatkan manajemen pendidikan

D. Tujuan dan Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Siak

1. Strategi

Mengacu kepada visi dan Misi yang telah ditetapkan maka strategi yang dipakai untuk mencapai visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Siak dalam kurun waktu 5 tahun melalui pembangunan sektor pendidikan, dengan Strategi sebagai berikut :

- a. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing
- b. Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan keputakaan daerah
- d. Ketersediaan informasi, sarana dan prasarana penunjang minat dan budaya baca masyarakat.
- e. Peningkatan Kapasitas Pemuda melalui pelatihan dan permagangan
- f. Peningkatan peran serta lembaga pendidikan dan masyarakat dalam pemasyarakatan dan peningkatan prestasi olahraga.

2. Kebijakan

Mengacu kepada Visi, Misi dan strategi yang telah ditetapkan, maka kebijakan yang diambil untuk mencapai visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Siak dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung keberlangsungan pendidikan anak usia dini melalui pembukaan akses keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini.
- b. Mengembangkan mutu pendidikan melalui pengembangan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan nilai-nilai agama dan Budaya Melayu.
- c. Mendorong pengembangan tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) melalui partisipasi masyarakat melakukan dalam mengontrol dan mengevaluasi kinerja PAUD.
- d. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung keberlangsungan Wajib Belajar 9 Tahun dan menyiapkan rintisan pelaksanaan wajib Belajar 12 tahun.
- e. Mengembangkan mutu pendidikan melalui pengembangan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan, pengembangan kurikulum, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang ditunjang dengan pengembangan dan pengamalan nilai-nilai Islam dan Melayu.
- f. Mendorong pengembangan tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan PENDAS melalui partisipasi masyarakat melakukan kontrol dan

mengevaluasi kinerja PENDAS.

- g. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung keberlangsungan pendidikan menengah serta perluasan akses pendidikan menengah ke semua strata dan lapisan masyarakat melalui pemberian insentif dan dukungan pembiayaan kepada kelompok kurang mampu.
- h. Mengembangkan mutu pendidikan melalui pengembangan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan, pengembangan kurikulum, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang ditunjang dengan pengembangan dan pengamalan nilai-nilai Islam dan Melayu.
- i. Mendorong pengembangan tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan Pendidikan Menengah melalui partisipasi masyarakat melakukan kontrol dan mengevaluasi kinerja Pelaksanaan pendidikan menengah.
- j. Memberikan bantuan biaya sosialisasi ke kecamatan untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya PNF (Pendidikan Non Formal) serta Memperluas kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan PNF.
- k. Mengembangkan mutu pendidikan melalui pengembangan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan, pengembangan kurikulum, pembangunan dan pengembangan satuan-satuan PNF serta pengembangan sertifikasi.
- l. Mendorong pengembangan tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan PNF melalui partisipasi masyarakat melakukan kontrol dan mengevaluasi kinerja Pelaksanaan PNF.

- m. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung keberangsaan PLB (Pendidikan Luar Biasa) serta perluasan akses PLB kesemua strata dan lapisan masyarakat melalui pemberian insentif dan dukungan pembiayaan kepada kelompok kurang mampu.
- n. Mengembangkan mutu pendidikan melalui pengembangan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan PLB.
- o. Mendorong partisipasi masyarakat melakukan kontrol dan evaluasi atas kinerja PLB dan Melakukan sosialisasi tentang pentingnya PLB.
- p. Meningkatkan akses masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu tetapi berprestasi, memasuki perguruan tinggi melalui pemberian dukungan pembiayaan.
- q. Memfasilitasi pengembangan kapasitas kelembagaan, tenaga pendidikan dan kependidikan serta pengembangan kemitraan dalam pengelolaan PT (Perguruan Tinggi).
- r. Memfasilitasi PT dalam pengembangan kapasitas pengelolaan PT.
- s. Mengembangkan mutu dan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan serta mendistribusikannya secara merata ke satuan-satuan pendidikan berdasarkan asas keadilan dan kebutuhan.
- t. Memfasilitasi pengembangan kapasitas kelembagaan, tenaga pendidikan dan kependidikan serta pengembangan kemitraan dalam pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.
- u. Mengembangkan sistem pelaporan dan kinerja satuan kerja.
- v. Melakukan reformasi kelembagaan, fungsi dan budaya birokrasi Dinas

Pendidikan melalui penerapan prinsip-prinsip *good public governance*
w. Memfasilitasi pengembangan kegiatan ekstrakurikuler olah raga di
setiap tingkatan pendidikan formal (SD sampai dengan SLTA).

Salah satu prinsip yang diikuti dalam menyusun perencanaan pendidikan ini adalah bahwa visi dan misi ini tidak akan terwujud sekaligus. Karena besarnya kesenjangan antara kondisi sekarang dengan kondisi yang akan diwujudkan maka program pengembangan dan pembangunan sektor pendidikan ini harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan yang secara konsisten diarahkan pada pencapaian tujuan untuk mewujudkan visi dan misi yang sudah digariskan. Untuk setiap tahapnya prioritas dan penekanan diberikan pada pencapaian tujuan tertentu dalam kerangka upaya mewujudkan visi dan misi tersebut.

Prinsip lain yang dipedomani adalah bahwa sekolah harus merupakan tempat yang nyaman baik fisik maupun non fisik bagi guru untuk mengajar atau bagi siswa untuk belajar. Sejalan dengan itu situasi dan kondisi yang kondusif untuk itu haruslah terlebih dahulu dibangun. Karena situasi dan kondisi pendidikan (persekolahan) di Kabupaten Siak masih belum ideal serta sangat variatif tidak hanya berkenaan dengan kondisi fisik tapi juga kondisi non fisik. Kondisi tenaga pengajar, sarana dan prasarana dan lain-lain yang dilihat dari kuantitas dan kualitas tidak memadai upaya yang dilakukan untuk membangun jenis dan tingkat pendidikan yang relevan dengan lapangan kerja tentu perlu direncanakan dengan pertimbangan berbagai aspek.

Dalam Program Pembangunan Daerah Kabupaten Siak arah kebijakan pembangunan pendidikan dirumuskan sebagai berikut :

a. Pemerataan dan Perluasan Akses pendidikan.

Kebijakan ini diarahkan pada upaya memperluas daya tampung untuk semua jenis dan jenjang satuan pendidikan memberikan kesempatan yang sama bagi semua kelompok umur peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan kemampuan intelektual serta kondisi fisik.

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Kabupaten Siak untuk dapat belajar sepanjang hayat hidup dalam rangka meningkatkan daya saing dalam semua aspek kehidupan serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

b. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing.

Kebijakan ini diarahkan untuk dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman social dan budaya. Mutu pendidikan juga dilihat dari meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai humanisme yang meliputi keteguhan iman dan taqwa serta berakhlak mulia, etika, wawasan kedaerahan dan kebangsaan serta global, kepribadian tangguh, ekspresi estetika dan kualitas jasmani. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan diukur dari pencapaian kecakapan akademik dan non-akademik yang lebih tinggi yang

memungkinkan lulusan dapat proaktif terhadap perubahan masyarakat dalam berbagai bidang baik ditingkat lokal, nasional maupun global.

Peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan.

c. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pelayanan publik.

Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong dan memberikan arah reformasi pendidikan secara efektif, efisien dan akuntabel. Kebijakan tata kelola, akuntabilitas dan pelayanan publik meliputi system pembiayaan berbasis kinerja baik ditingkat satuan pendidikan maupun pada tingkat unit pelaksana teknis, peningkatan etos kerja dan disiplin kerja dalam rangka mewujudkan pelayanan bermutu mengintensifkan Sistem Pengawasan Internal (SPI), pengawasan masyarakat serta pengawasan fungsional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

d. Pelestarian nilai-nilai seni budaya melayu dan nasional.

Kebijakan ini diarahkan untuk dapat Melestarikan dan mengembangkan kekayaan dan keragaman budaya daerah dan nasional sehingga dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Otonomi Daerah

1. Masa kolonial

Pada tahun 1903, pemerintah kolonial mengeluarkan staatsblaad No. 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri. Kemudian staatsblaad ini diperkuat dengan Staatsblaad No. 137/1905 dan S. 181/1905. Pada tahun 1922, pemerintah kolonial mengeluarkan sebuah undang-undang S. 216/1922. Dalam ketentuan ini dibentuk sejumlah provincie, regentschap, stadsgemeente, dan groepmeneenschap yang semuanya menggantikan locale ressort. Selain itu juga, terdapat pemerintahan yang merupakan persekutuan asli masyarakat setempat (zelfbestuurende landschappen).

Pemerintah kerajaan satu per satu diikat oleh pemerintahan kolonial dengan sejumlah kontrak politik (kontrak panjang maupun kontrak pendek). Dengan demikian, dalam masa pemerintahan kolonial, warga masyarakat dihadapkan dengan dua administrasi pemerintahan.

2. Masa Pendudukan Jepang

Ketika menjalar PD II Jepang melakukan invasi ke seluruh Asia Timur mulai Korea Utara ke Daratan Cina, sampai Pulau Jawa dan Sumatra. Negara ini berhasil menaklukkan pemerintahan kolonial Inggris di Burma dan Malaya, AS di Filipina, serta Belanda di Daerah Hindia Belanda. Pemerintahan Jepang yang singkat, sekitar tiga setengah tahun

berhasil melakukan perubahan-perubahan yang cukup fundamental dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah-wilayah bekas Hindia Belanda. Pihak penguasa militer di Jawa mengeluarkan undang-undang (Osamu Seire) No. 27/1942 yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada masa Jepang pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan. Penyebutan daerah otonom bagi pemerintahan di daerah pada masa tersebut bersifat misleading.

3. Masa Kemerdekaan

a. Periode Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah¹

Menurut pasal 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa susunan Negara Republik Indonesia adalah bersusun tunggal. Artinya tidak ada negara dalam negara. Konsekuensi dari pilihan bentuk negara kesatuan ini maka penyelenggaraan pemerintahan pada prinsipnya dilakukan oleh pemerintah pusat.²

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 menitikberatkan pada asas dekonsentrasi, mengatur pembentukan KND (Komite Nasional Daerah) di keresidenan, kabupaten, kota berotonomi, dan daerah-daerah yang dianggap perlu oleh mendagri. Pembagian daerah terdiri atas dua macam yang masing-masing dibagi dalam tiga tingkatan yakni:

1) Provinsi

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, Rajawali pers, 2006), h. 314

² Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2005), cet. Ke-2 h.

- 2) Kabupaten/kota besar
- 3) Desa/kota kecil.

UU No.1 Tahun 1945 hanya mengatur hal-hal yang bersifat darurat dan segera saja. Dalam batang tubuhnya pun hanya terdiri dari 6 pasal saja dan tidak memiliki penjelasan.

b. Periode Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri

Peraturan kedua yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia adalah UU Nomor 22 tahun 1948 yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 1948. Dalam UU itu dinyatakan bahwa daerah Negara RI tersusun dalam tiga tingkat yakni:

- 1) Propinsi
- 2) Kabupaten/kota besar
- 3) Desa/kota kecil
- 4) Yang berhak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Undang-undang No. 22 Tahun 1948, bermaksud mengadakan keseragaman (uniformitas) dalam pemerintahan daerah bagi seluruh Indonesia dan membahas tingkatan badan-badan pemerintahan sedikit mungkin (tiga tingkatan, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota besar)³

c. Periode Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2005) Cet. 1 h.

Menurut UU No. 1 Tahun 1957, daerah otonom diganti dengan istilah daerah swatantra. Wilayah RI dibagi menjadi daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangga sendiri, dalam tiga tingkat, yaitu:

- 1) Daerah swatantra tingkat I, termasuk kotapraja Jakarta Raya
- 2) Daerah swatantra tingkat II
- 3) Daerah swatantra tingkat III.

UU No. 1 Tahun 1957 ini menitikberatkan pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya sesuai Pasal 31 ayat (1) UUDS 1950.

d. Periode Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959

Penpres No. 6 Tahun 1959 yang berlaku pada tanggal 7 November 1959 menitikberatkan pada kestabilan dan efisiensi pemerintahan daerah, dengan memasukkan elemen-elemen baru. Penyebutan daerah yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dikenal dengan daerah tingkat I, tingkat II, dan daerah tingkat III.

Dekonsentrasi sangat menonjol pada kebijakan otonomi daerah pada masa ini, bahwa kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat, terutama dari kalangan pamong praja.

e. Periode Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-undang ini akan membagi habis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kedalam daerah-daerah otonom. Hal tersebut tertuang dalam pasal (1) yang menyatakan:⁴

Wilayah Negara Republik Indonesia terbagi habis dalam daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan tersusun dalam tiga tingkatan sebagai berikut:

1. Provinsi dan/atau Kota Raya sebagai daerah tingkat I
2. Kabupaten dan/atau Kotamadya sebagai daerah tingkat II
3. Kecamatan dan/atau Kotapraja sebagai daerah tingkat III

Sebagai alat pemerintah pusat, kepala daerah bertugas memegang pimpinan kebijaksanaan politik polisional di daerahnya, menyelenggarakan koordinasi antarjawatan pemerintah pusat di daerah, melakukan pengawasan, dan menjalankan tugas-tugas lain yang diserahkan kepadanya oleh pemerintah pusat. Sebagai alat pemerintah daerah, kepala daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekutif pemerintahan daerah, menandatangani peraturan dan keputusan yang ditetapkan DPRD, dan mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan.

f. Periode Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

UU ini menyebutkan bahwa daerah berhak mengatur, dan mengatur rumah tangganya berdasar asas desentralisasi. Dalam UU ini dikenal dua tingkatan daerah, yaitu daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Daerah negara dibagi-bagi menurut tingkatannya menjadi:

- 1) Provinsi/ibu kota negara

⁴ Dasril Rajab, *op.cit.*, h. 124

2) Kabupaten/kotamadya

3) Kecamatan

Titik berat otonomi daerah terletak pada daerah tingkat II karena daerah tingkat II berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat. Prinsip otonomi dalam UU ini adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

g. Periode Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Pada prinsipnya UU ini mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan desentralisasi. Pokok pikiran dalam penyusunan UU No. 22 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas desentralisasi dalam kerangka NKRI.
- 2) Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah provinsi sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan daerah kota.
- 3) Daerah di luar provinsi dibagi dalam daerah otonomi.
- 4) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten.

Secara umum, UU No. 22 tahun 1999 banyak membawa kemajuan bagi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tetapi sesuai perkembangan keinginan masyarakat daerah, ternyata UU ini juga dirasakan belum memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

h. Periode Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Pada tanggal 15 Oktober 2004 disahkan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah yang dalam pasal 239 dengan tegas menyatakan bahwa dengan berlakunya UU ini, UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi. UU baru ini memperjelas dan mempertegas hubungan hierarki antara kabupaten dan provinsi, antara provinsi dan pemerintah pusat berdasarkan asas kesatuan administrasi dan kesatuan wilayah. Pemerintah pusat berhak melakukan kordinasi, supervisi, dan evaluasi terhadap pemerintahan di bawahnya, demikian juga provinsi terhadap kabupaten/kota. Di samping itu, hubungan kemitraan dan sejajar antara kepala daerah dan DPRD semakin dipertegas dan diperjelas.

B. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 ayat (5) dikemukakan bahwa otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵

⁵ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2006) Cet. 1 h. 8

Pemerintah daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain; menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut akan menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan. Proses dari sentralisasi ke desentralisasi ini pada dasarnya tidak semata-mata desentralisasi administratif, tetapi juga bidang politik dan sosial budaya.

Dengan demikian, dampak pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi pada organisasi /administrasi lembaga pemerintahan daerah saja, akan tetapi berlaku juga pada masyarakat/publik), badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang.

Dengan otonomi daerah ini terbuka kesempatan bagi pemerintah daerah secara langsung membangun kemitraan dengan public dan pihak swasta daerah yang bersangkutan dalam berbagai bidang pula.

C. Otonomi Bidang Pendidikan

Istilah desentralisasi sering dibahas dalam konteks diskusi tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di zaman sekarang

ini, hampir setiap negara di dunia dalam menjalankan sistem pemerintahannya, menganut asas desentralisasi. Perkembangan ajaran ketatanegaraan yang menerapkan asas desentralisasi bukan merupakan alternatif yang serta merta mengganti asas sentralisasi, karena antara asas sentralisasi dan desentralisasi tidak bersifat dikotomis, melainkan merupakan subsistem yang mempunyai kedudukan dan fungsi yang sederajat dalam kerangka sistem organisasi ketatanegaraan menyeluruh.⁶

Pemberlakuan sistem desentralisasi akibat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang kemudian di ubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, memberi dampak terhadap pelaksanaan pada manajemen pendidikan yaitu memberi ruang gerak yang lebih luas kepada pengelolaan pendidikan untuk menemukan strategi kompetisi dalam era kompetitif mencapai output pendidikan yang berkualitas dan mandiri. Kebijakan desentralisasi akan berpegang secara signifikan dengan pembangunan pendidikan. Setidaknya ada empat dampak positif untuk mendukung kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu:

1. Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah maka sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan sumber daya yang dimiliki.
2. Efisiensi keuangan hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak local dan mengurangi biaya operasional.

⁶ Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2011), h. 99

3. Efisiensi administrasi dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat.
4. Perluasaan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan.

Perlakuan desentralisasi pendidikan mengharuskan diperkuatnya landasan dasar pendidikan yang demokratis, transparan, efisien, dan melibatkan partisipasi masyarakat daerah. Pendidikan merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan manusia, pengembang pengetahuan, ketrampilan, nilai dan kebudayaan.

Desentralisasi pendidikan dapat terjadi dalam tiga tingkatan, yaitu dekonstruksi, delegasi, dan devolusi.

Dekonstruksi adalah proses pelimpahan sebagian kewenangan kepada pemerintah atau lembaga yang lebih rendah dengan supervise dari pusat. Delegasi mengandung makna terjadinya penyerahan kekuasaan penuh sehingga tidak lagi memerlukan supervise dari pemerintah pusat. Sementara delegasi mengandung makna terjadinya penyerahan kekuasaan yang penuh sehingga tidak lagi memerlukan supervise dari pemerintah pusat. Pada tingkat devolusi di bidang pendidikan terjadi apabila memenuhi empat ciri, yaitu:

1. terpisahnya peraturan perundangan yang mengatur pendidikan daerah dan pusat
2. kebebasan lembaga daerah dalam mengelola pendidikan

3. lepas dari supervisi hirarkis pusat;
4. kewenangan lembaga daerah diatur dengan peraturan perundangan.

Dalam konteks otonomi pendidikan, secara alamiah (nature) pendidikan adalah otonom. Otonomi pada hakikatnya bertujuan untuk memandirikan seseorang atau suatu lembaga atau suatu daerah, sehingga tujuan pendidikan mempunyai tujuan untuk member suatu otonomi dalam mewujudkan fungsimanajemen pendidikan kelemagaan.

Namun sejak dilaksanakannya otonomi pendidikan, ternyata pelaksanaannya belum berjalan sebagai mana diharapkan, justru pemberlakuan otonomi membuat banyak masalah yaitu mahal biaya pendidikan. Sedangkan, pengertian otonomi pendidikan sesungguhnya terkandung makna demokrasi dan keadilan sosial, artinya pendidikan dilakukan secara demokrasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan dan pendidikan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan cita-cita bangsa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Konsep Otonomi Pendidikan

Pengertian otonomi dalam konteks desentralisasi pendidikan, menurut Tilaar mencakup enam aspek, Yakni:

1. Pengaturan perimbangan kewenangan pusat dan daerah
2. Manajemen partisipasi masyarakat dalam pendidikan.
3. Penguatan kapasitas manajemen pemerintah daerah.
4. Pemberdayaan bersama sumber daya pendidikan.
5. Hubungan kemitraan stakeholders pendidikan.

6. Pengembangan infrastruktur sosial.

Otonomi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah terungkap pada Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang tua, Masyarakat dan Pemerintah.

Pada bagian ketiga Hak dan Kewajiban Pasal 8 disebutkan bahwa “ Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan; pasal 9 Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dalam Pasal 186 menyebutkan bahwa Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah.

Begitu juga pada bagian keempat Hak dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah daerah, pasal 11 ayat (2) “ Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin terjamin tersedianya dan guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”. Khusus ketentuan bagi perguruan Tinggi pasal 24 ayat (2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep otonomi pendidikan mengandung pengertian yang luas mencakup filosofi, tujuan,

format dan isi pendidikan serta manajemen pendidikan itu sendiri. Implikasinya adalah setiap daerah otonomi harus memiliki visi dan misi pendidikan yang jelas dan jauh ke depan dengan melakukan pengkajian yang mendalam dan meluas tentang trend perkembangan penduduk dan masyarakat untuk memperoleh knonstruk masyarakat di masa depan dan tindaklanjunya, merancang sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristik budaya bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika dalam perspektif tahun 2020.

Kemandirian daerah itu harus diawali dengan evaluasi diri, melakukan analisis factor internal dan eksternal daerah guna mendapat suatu gambaran nyata tentang kondisi daerah sehingga dapat disusun suatu strategi yang matang dan mantap dalam upaya mengangkat harkat dan martabat daerah yang berbudaya dan daya saing tinggi melalui otonomi pendidikan yang bermutu daan produktif.

D. Reformasi pendidikan di Indonesia

Setiap periode perkembangan pendidikan nasional adalah persoalan penting bagi suatu bangsa karena perkembangan tersebut menentukan tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, karakteristik, dan kesadaran politik yang banyak memengaruhi masa depan bangsa tersebut. setiap periode perkembangan pendidikan adalah faktor politik dan kekuatan politik karena pada hakikatnya pendidikan adalah cerminan aspirasi, kepentingan, dan tatanan kekuasaan kekuatan-kekuatan politik yang sedang berkuasa.⁷

⁷ M. Sirozi, *Politik Pendidikan*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2007), hal 185

Krisis multidimensi yang berkepanjangan memang telah membuat bangsa Indonesia jatuh terpuruk dan semakin tertinggal dari bangsa-bangsa lain dari berbagai aspek kehidupan. Namun, pada saat yang sama krisis multi dimensi dan berkepanjangan telah menumbuhkan kesadaran, tekad, komitmen, dan aspirasi baru pada bangsa Indonesia untuk mengevaluasi, mendokentruksi, dan merekontruksi system pemerintahan dan pembangunan agar berkualitas, efektif dan efisien.

Salah satu langkah fundamental yang telah diambil untuk membawa bangsa ini keluar dari keterpurukannya adalah dengan menerapkan kebijakan otonomi daerah. Kebijakan ini secara resmi mulai berlaku berkenaan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

Kuatnya arus reformasi dan demokratisasi membuat proses otonomisasi berjalan sangat cepat dan dinamis sehingga berkembang melampaui ketentuan yang diatur dalam dua undang-undang tersebut. Hanya dalam waktu kurang dari lima tahun, dua undang-undang tersebut dinilai tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah dan pada tanggal 25 oktober 2004, UU No. 22 Tahun 1999 secara resmi diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 Tahun 1999 diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004 dengan nama yang sama.

Sesuai dengan namanya, UU No. 32 Tahun 2004 mengatur berbagai hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam bingkai kebijakan otonomi daerah.

Komitmen bangsa Indonesia terhadap pendidikan dengan sangat jelas tercermin pada konstitusi negara, UUD 45, khususnya pasal 31, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (ayat 1) dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya (ayat 2). Skema pembiayaan pendidikan oleh pemerintah tersebut diatur pada ayat 4 yang berbunyi “negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.⁸

Kebijakan otonomi daerah merupakan bagian integral dari program reformasi sistem pemerintahan dan pembangunan secara menyeluruh, tetapi pendidikan adalah salah satu aspek yang mendapat perhatian yang sangat besar di dalamnya. Bidang pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah, adalah salah satu bidang yang diotonomikan kepada pemerintah daerah sehingga kebijakan Otda tidak hanya menjadi titik tolak reformasi bidang sosial dan politik, tetapi juga menjadi titik tolak reformasi sistem pendidikan nasional.

⁸ M. Sirozi, *Politik Pendidikan*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2007), hal 202

Untuk daerah Kabupaten Siak sejak mulai diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang berkembang dengan cukup pesat di daerah tersebut. Menurut anggota DPRD Kabupaten Siak yang penulis wawancarai⁹ dengan adanya undang-undang otonomi khususnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Pemerintahan Daerah dapat mengembangkan daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerah itu sendiri.

Sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah bersamaan dengan diberlakukannya otonomi daerah khususnya di bidang pendidikan mengalami perubahan yang cukup signifikan di mulai dari perubahan anggaran dalam bidang pendidikan di daerah sampai kepada masalah teknis di bidang pendidikan misalnya masalah kurikulum yang sudah menjadi kewenangan masing-masing daerah.

⁹ Wawancara Dengan Muhtarom S.Ag, Anggota DPR D Kab..... *ibid.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak

Dalam hal sarana dan prasarana pendidikan telah diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010¹ Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota Pasal 2 Ayat (2) huruf b.3 sampai b.4 yang berbunyi

3. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (*globe*), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
4. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;

Pendidikan seyogyanya menjadi prioritas pembangunan yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, yakni dengan memberikan hak dan kewajiban bagi daerah untuk menyelenggarakan urusan pendidikan daerah menuju kemandirian daerah. Di sisi lainnya, pendidikan yang menjadi isu nasional terkait dengan tuntutan penguasaan kompetensi bagi setiap lulusan dalam hal penguasaan pengetahuan dan keterampilan, menghendaki

¹Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 15 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota

adanya kewenangan pemerintah daerah yang mampu memperjelas sistem pengelolaan pendidikan.

Fokus penelitian tentang otonomi pendidikan di Kabupaten Siak khususnya di wilayah Kecamatan Sabak Auh adalah faktor pendukung dan penghambat implementasi otonomi pendidikan yang dapat menjadi penentu keberhasilan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Kehadiran UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah tersebut diharapkan mampu memberikan perubahan yang signifikan dalam penyelenggaraan urusan pendidikan di daerah yang selama ini telah dinanti-nantikan oleh sebagian besar di tanah air.

Terkait dengan otonomi bidang pendidikan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada daerah, dari hasil wawancara² diketahui otonomi bidang pendidikan merupakan harapan sejak lama, tetapi dalam proses pelaksanaannya tergantung kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Pihak DPRD Kabupaten Siak sebagai perwakilan aspirasi masyarakat hanya memantau dan mengontrol pelaksanaan tersebut. namun diakui bahwa otonomi pendidikan membawa pengaruh yang besar terhadap pendidikan di Kabupaten Siak

Menyikapi otonomi bidang pendidikan yang dilimpahkan Pemerintah Pusat kepada daerah yaitu pemerintah kabupaten/kota yang menghendaki kesiapan daerah untuk melaksanakannya, dari hasil wawancara³ dapat

² Wawancara dengan Muhtarom, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Siak, Tanggal 27 November 2012.

³ Wawancara dengan Selamat Riyadi, Bidang Pengembangan Mutu Dan Pengajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, Tanggal 27 November 2012

diketahui pihak dinas tetap melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan cabang dinas yang ada di kecamatan karena cabang dinas di tingkat kecamatanlah yang tahu pasti pendidikan di daerahnya. Tetapi cabang dinas di kecamatan tidak diberikan wewenang langsung untuk mengambil suatu keputusan, tetapi harus tetap berkonsultasi dengan kabupaten melalui dinas pendidikan.

Pandangan serupa dikemukakan kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Sabak Auh yang penulis wawancarai⁴ bahwa dalam menyikapi kebijakan Pemerintah Pusat melimpahkan kewenangan bidang pendidikan kepada daerah, maka cabang dinas dituntut bekerja lebih keras karena cabang dinas adalah institusi yang paling mengetahui keadaan daerah. Cabang dinas ini merupakan pihak terdepan yang berhadapan langsung dengan permasalahan pendidikan di daerah. Permasalahan yang ada cabang dinas hanya merekomendasikan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan.

Di dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003⁵ disebutkan bahwa :

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

⁴ Wawancara dengan Selamat, kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, 5 Desember 2012.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Lahirnya kebijakan otonomi bidang pendidikan diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pendidikan di daerah secara keseluruhan. Mengenai pandangan kepala sekolah tentang hal ini, dari hasil wawancara⁶ diketahui bahwa kebijakan otonomi bidang pendidikan yang dilimpahkan kepada daerah di harapkan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pendidikan terutama bagi sekolah.

Pandangan yang sama juga di kemukakan kepala sekolah yang diwawancarai berikut, bahwa kebijakan otonomi bidang pendidikan sangat mempengaruhi sekali keberhasilan pelaksanaan pendidikan di daerah karena sebelum adanya otonomi tersebut permasalahan pendidikan di daerah sulit diatasi, seperti kebijakan pengembangan kurikulum yang kini telah dilimpahkan kepada daerah masing-masing sehingga kami (pihak sekolah) menyambut baik kesempatan yang diberikan untuk memandirikan penyelenggaraan pendidikan.⁷

Masih dalam permasalahan yang sama, kepala sekolah yang penulis wawancarai menyatakan bahwa kehadiran otonomi bidang pendidikan diharapkan mendukung keberhasilan pelaksanaan pendidikan daerah secara luas, karena bantuan-bantuan yang diberikan langsung ditujukan kepada sekolah, sedangkan sebelum adanya kebijakan tentang otonomi tersebut dikatakan ruang lingkup pendidikan sangat kecil. Tetapi tentunya

⁶ Wawancara dengan Nurbaiti, Kepala Sekolah SDN 002 Desa Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, Tanggal 6 Desember 2012

⁷ Wawancara dengan Sumarno, Kepala Sekolah SDN 004 Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh, Tanggal 6 Desember 2012

keberhasilan tersebut belum menyeluruh karena banyak sarana dan prasarana yang kurang memadai.⁸

Pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah bidang pendidikan di era desentralisasi ini haruslah mengacu kepada *school based management* menurut Umaedi, artinya pengelolaan otonomi pendidikan tidak hanya berhenti pada kabupaten tetapi harus dilanjutkan pada sekolah yang menginginkan adanya keseimbangan antara kewenangan sekolah, kabupaten, pemerintah daerah dan pemerintah pusat⁹. hal ini dapat dipahami mengingat sekolah adalah penyelenggara pendidikan yang langsung berhadapan dengan serangkaian permasalahan pendidikan itu sendiri.

Dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di bidang pendidikan meliputi bidang-bidang antara lain kebijakan, pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan dan pengendalian mutu pendidikan.

Konsepsi pengelolaan pendidikan tersebut, dalam implementasinya tidaklah semudah yang dibayangkan melainkan memerlukan proses dan acuan lebih lanjut. Pada kondisi demikian, yang menjadi pertimbangan pelimpahan kewenangan bidang pendidikan kepada daerah menurut hasil wawancara penulis¹⁰, masyarakat diharapkan mampu untuk menghadapi

⁸ Wawancara dengan Ramli, Kepala Sekolah SDN 006 Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh, tanggal 6 Desember 2012

⁹ Ali Muhdi Amnur, *op.cit.* h.245

¹⁰ Wawancara dengan Muhtarom, *op.cit.*

tuntutan zaman modern yang sekarang sedang gencar-gencarnya menghadapi perubahan zaman yang serba teknologi serta supaya daerah mampu memandirikannya. Tujuannya semata-mata untuk memandirikan daerah dalam memberikan otonomi yang nyata, luas dan bertanggungjawab.

Pendidikan di Indonesia harus peka pada peluang yang muncul sekaligus peka terhadap tantangan yang menghadang. Dalam rangka menghadapi inilah dibutuhkan paradigma baru pendidikan, sebagaimana dikemukakan bahwa pokok-pokok yang harus ada dalam paradigma baru pendidikan di Indonesia adalah :¹¹

1. Pendidikan ditujukan untuk membentuk masyarakat indonesia baru yang demokratis.
2. Untuk mencapai masyarakat yang demokratis diperlukan pendidikan yang dapat menumbuhkan individu dan masyarakat yang demokratis.
3. Pendidikan diarahkan untuk mengembangkan tingkah laku yang dapat menjawab tantangan internal sekaligus tantangan global.
4. Pendidikan harus mampu mengarahkan lahirnya suatu bangsa Indonesia yang bersat serta demokratis.
5. Di dalam menghadapi kehidupan global yang kompetitif dan inovatif, pendidikan harus mampu mengarahkan kemampuan berkompetisi di dalam rangka kerja sama.
6. Pendidikan harus mampu mengembangkan kebhinekaan menuju pada terciptanya suatu masyarakat indonesia yang bersatu di atas kekayaan kebhinekaan masyarakat.
7. Pendidikan harus mampu meng-Indonesiakan masyarakat Indonesia sehingga setiap insan merasa bangga menjadi insan Indonesia.

Pelimpahan kewenangan otonomi bidang pendidikan jelas menghendaki perubahan bagi dunia pendidikan di daerah khususnya yang selama ini diharapkan, sekalipun berbagai tantangan menyertainya. Hal ini diakui kepala sekolah yang penulis wawancarai, bahwa secara umum

¹¹ H.A.R Tilaar, *Op.Cit.* h.41

kebijakan otonomi bidang pendidikan membawa harapan yang besar bagi mandiri pendidikan di daerah kepada penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik karena pemerintah langsung menyerahkan sebagian kewenangan pengelolaan pendidikan kepada daerah yang bersangkutan.¹²

Pemberlakuan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disertai dengan peraturan pendukung lainnya seperti PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, menuntut adanya perubahan pengelolaan pendidikan dari sentralistik menjadi bersifat desentralistik di tiap daerah. Namun tidak dapat disangkal, masih ditemui sebagian daerah yang belum siap menerima kewenangan pengelolaan pendidikan tersebut. Alasan yang sering terdengar yang di gunakan oleh daerah di antaranya¹³

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai.
- b. Sarana dan prasarana yang belum tersedia.
- c. Anggaran pendapata asli daerah (PAD) sangat rendah.
- d. Secara psikologis, mental mereka terhadap perubahan belum siap.
- e. Mereka juga gamangatau takut terhadap upaya perubahan.

Implementasi kewenangan penyelenggaraan pendidikan di daerah tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan yang ada dan daerah dituntut harus siap menghadapinya sesuai konsekuensi dari otonomi daerah. Akar permasalahan yang kelihatan adalah aspek sumber daya yang dimiliki daerah untuk menjalankan kewenangan tersebut masih terbatas. Hal inilah yang

¹² Wawancara dengan Sumarno, Kepala Sekolah SDN 004 , *op.cit*

¹³ H. A.R Tilaar, *op.cit* h.2

mempengaruhi keberhasilan implementasi otonomi daerah bidang pendidikan, karena tidak semua daerah memiliki sumber daya yang memadai.

Dampak pelimpahan kewenangan secara umum adalah dengan adanya pelimpahan ini maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali dari pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah dalam daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dengan adanya pelimpahan kewenangan ini juga kebijakan-kebijakan pemerintah daerah akan lebih tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah lebih cenderung mengetahui keadaan dan situasi di daerahnya daripada pemerintah pusat.

Meski demikian, kebijakan otonomi diakui memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan saat ini, sebagaimana dikemukakan kepala sekolah yang penulis wawancarai¹⁴ bahwa dampak yang dirasakan sekolah setelah pemerintah memberikan otonomi bidang pendidikan kepada daerah adalah sekolah bisa mengatur metode-metode pengelolaan pendidikan secara mandiri yang bertujuan untuk kemajuan sekolah bersengkutan.

Terkait dengan dampak kebijakan otonomi bidang pendidikan ini, kepala sekolah yang penulis wawancarai¹⁵ menyatakan setelah adanya otonomi tersebut lingkup pengelolaan pendidikan mulai bertambah luas sehingga memungkinkan pihak sekolah untuk mengelola dan

¹⁴ Wawancara dengan Ramli, Kepala Sekolah SDN 006 Sungai Tengah,*op.cit.*

¹⁵ Wawancara dengan Nurbaiti, Kepala Sekolah SDN 002 Desa Bandar Sungai, *op.cit.*

mengembangkan pendidikan di daerahnya secara luas tetapi tetap dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan peraturan-peraturan yang di atur oleh daerah yang bersangkutan.

Pelaksanaan otonomi bidang pendidikan diimplementasikan dengan melimpahkan kewenangan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Mengenai sarana dan prasarana ini menurut wawancara penulis¹⁶, masih terdapat beberapa daerah yang sarana dan prasarananya masih belum terpenuhi secara lengkap dan memadai sesuai kebutuhan sekolah itu sendiri.

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap dan memadai merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi bidang pendidikan, karena daerah dituntut untuk menyelenggarakan pendidikan di daerah dengan memanfaatkan potensi yang ada, termasuk kebutuhan akan saran dan prasarana. Namun, menurut kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sabak Auh yang penulis wawancarai¹⁷, bahwa pelaksanaan otonomi bidang pendidikan di kecamatan tersebut masih belum berjalan sebagaimana maestinya karena masalah sarana dan prasarana belum terpenuhi secara lengkap dan memadai.

Sarana dan prasarana pendidikan memang sangat dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan otonomi bidang pendidikan menuju kemandirian daerah yang bersinergis, dalam artian ketidaksiapan daerah menjalankan otonomi bidang pendidikan kemungkinan disebabkan oleh sarana dan prasarana belum

¹⁶ Wawancara dengan Muhtarom,.*op.cit*

¹⁷ Wawancara dengan Selamat,.*op.cit*

tersedia secara cukup dan memadai. Hal ini menurut M. Chan dan Tuti T. Sam¹⁸

Berhubungan erat dengan ketersediaan dana yang ada di setiap daerah. Selama ini, mungkin daerah-daerah tertentu asyik dan terlena dengan sistem *dropping* yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Mereka sangat terkejut (*future shock*) ketika tiba-tiba memperoleh kewenangan untuk mengelola secara mandiri sebagian besar urusan pendidikan di daerahnya. Untuk itu mereka belum siap dengan segala bentuk sarana dan prasarana yang diperlukan. Jika dalam waktu singkat mereka dipersyaratkan untuk melengkapi segala bentuk sarana dan prasarana tersebut, mereka akan mengalami kesulitan besar kecuali jika pemerintah pusat masih bersedia membantu dan menyediakan segala bentuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan desentralisasi pendidikan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa optimalisasi pelaksanaan otonomi bidang pendidikan sangat dipengaruhi dengan tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai, sehingga implementasi dapat dicapai sesuai dengan harapan bangsa ini. Menurut kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sabak Auh, sebagian besar sekolah di daerah tersebut belum memiliki perpustakaan baik pelaksanaan dan pengelola, begitu juga dengan labor, sebagian besar sekolah yang ada di daerah tersebut belum memilikinya.¹⁹

Mengenai kemampuan sekolah mengadaptasi tuntutan dan perkembangan di bidang pendidikan, kepala sekolah yang penulis wawancarai²⁰, menyatakan pada hakekatnya sekolah mampu mengadaptasi dan menghadapi perkembangan saat ini jika mau bersatu dan bekerja keras, karena sekolah-sekolah yang masih kekurangan sarana dan prasarana bisa

¹⁸ M. Chan dan Tuti T. Sam, *op.cit.* h.4

¹⁹ Wawancara dengan Selamat, Kepala UPTD.*op.cit.*

²⁰ Wawancara dengan Nurbaiti, Kepala Sekolah SDN 002.*op.cit*

terjun langsung kelapangan bersama muridnya untuk meneliti sehingga diperoleh bandingan sekaligus pengalaman nyata yang dapat digunakan untuk meningkatkan keberhasilan pendidikan.

Masih dalam permasalahan yang sama, kepala sekolah yang penulis wawancarai²¹, menyatakan bahwa sekolah diyakini lebih mampu mengadaptasi perkembangan dewasa ini walaupun tidak sepenuhnya, tetapi tentunya agak lebih baik dibandingkan sebelum otonomi bidang pendidikan karena melalui kewenangan dan keleluasaan yang diberikan kepada daerah itu membuat daerah bisa berbuat banyak untuk mengelola pendidikan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah.

Berdasarkan uraian-uraian yang terdahulu, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan pendidikan di kecamatan sabak auh masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan karena masih di temui beberapa kondisi dilapangan yang mempengaruhi implementasi kebijakan itu sendiri, terutama masalah sarana dan prasarana yang masih belum terpenuhi secara lengkap dan memadai.

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak

1. Faktor-faktor Pendukung

Pelimpahan wewenang kepada daerah membawa konsekuensi terhadap pembiayaan guna mendukung proses desentralisasi sebagaimana

²¹ Wawancara dengan Sumarno, Kepala Sekolah SDN 004 *op.cit*

termuat dalam pasal 12 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 bahwa urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.²²

Jumlah kewenangan yang begitu besar tersebut membawa perubahan struktur dalam pengelolaan pendidikan, dan berlaku juga pada penentuan *stakeholders* di dalamnya. Jika pada masa sebelum diberlakukannya otonomi daerah, *stakeholders* pendidikan sepenuhnya berada di tangan aparat pusat, maka di era otonomi pendidikan sekarang ini peranan sebagai *stakeholders* akan tersebar kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

Sejalan dengan arah kebijakan otonomi dan desentralisasi yang akan ditempuh oleh pemerintah, tanggung jawab pemerintah daerah akan meningkat dan semakin luas, termasuk dalam manajemen pendidikan. Pemerintah daerah di harapkan untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya dalam berbagai tahap pembangunan pendidikan, sejak tahap perumusan kebijakan daerah, perencanaan, pelaksanaan, sampai pemantauan atau monitoring di daerah masing-masing sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional yang telah digariskan pemerintah.

Dalam masalah pendanaan pendidikan dalam pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 % dari

²² Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2006), Cet. 1 h. 18

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

Sesuai dengan masalah di atas anggota DPRD Kabupaten Siak yang penulis wawancarai menyebutkan bahwa daerah Kabupaten Siak menyerap anggaran untuk bidang pendidikan di berbagai satuan kerja lebih dari 20% berbeda dengan sebelum adanya otonomi daerah anggaran untuk pendidikan masih di bawah 20%.²³

Kewenangan otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah khususnya di bidang pendidikan sebenarnya telah lama dinanti-nantikan, sehingga kewenangan nyata, luas dan bertanggung jawab ini di limpahkan setiap daerah dituntut siap menerima dan berusaha mengaktualisasinya secara efektif dan efisien. Namun fenomena yang ditemui ternyata pelaksanaan otonomi bidang pendidikan di beberapa daerah termasuk Kabupaten Siak tepatnya di Kecamatan Sabak Auh belum berjalan dengan maksimal, meskipun terdapat juga faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan otonomi bidang pendidikan tersebut.

Faktor pendukung implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan secara keseluruhan yang dihadapi oleh Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Siak melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Sabak Auh:

²³ Wawancara dengan Muhtarom, Ketua komisi 1 *ibid*.

a. Pemerintah Daerah

Implikasi desentralisasi manajemen berbasis pendidikan adalah kewenangan yang lebih besar diberikan kepada kabupaten dan kota untuk mengelola pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya, perubahan kelembagaan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan efesiensi serta efektifitas dalam perencanaan dan palaksanaan pada unit-unit kerja di daerah, kepegawaian yang menyangkut perubahan dan pemberdayaan sumber daya manusia menekankan pada profesionalisme, serta perubahan-perubahan anggaran pendidikan.

Adanya desentralisasi pendidikan ini pemerintah daerah adalah faktor yang sangat mendukung untuk mencapai kebijakan otonomi pendidikan sesuai yang diharapkan. Menurut Selamat Riyadi²⁴ Pemerintah Daerah merupakan instansi yang di beri kewenangan yang semakin luas terutama dalam hal kebijakan pendidikan termasuk di dalamnya dalam hal pembangunan pendidikan mulai dari tahap perumusan kebijakan pendidikan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pemantauan atau monitoring pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pendapat yang sama dikemukakan kepala UPTD Pendidikan kec. Sabak Auh yang penulis wawancarai²⁵, menurutnya dengan adanya desentralisasi ini pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas di berbagai bidang termasuk di dalamnya bidang pendidikan

²⁴ Wawancara dengan Selamat Riyadi, *op.cit.*

²⁵ Wawancara dengan Selamat, kepala UPTD Pendidikan, , *op.cit.*

dengan demikian pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan otonomi bidang pendidikan ini.

Dalam kebijakan desentralisasi pendidikan, pemindahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bukanlah hal penting, yang penting adalah mendorong terjadinya proses otonomi baik pada pemerintah daerah maupun pada setiap satuan pendidikan agar memiliki kemampuan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan adil. Kendariapun dalam hal ini sangat ditentukan oleh kekuatan suatu daerah otonom yang dapat dilihat dari besarnya APBD masing-masing yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, dana perimbangan, sumbangan pihak ketiga, serta sumber-sumber pendapatan lainnya.²⁶

b. Masyarakat

Dalam konteks desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat sangat diperlukan. Aparatur pendidikan baik di pusat maupun di daerah, berperan penting dalam peningkatan peran serta, efisiensi, dan produktivitas masyarakat untuk membangun pendidikan mandiri dan profesional. Salah satu sasaran pembangunan adalah mewujudkan desentralisasi daerah yang nyata, dinamis, bertanggung jawab. Titik berat desentralisasi di letakkan pada Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, peningkatan kualitas aparatur pendidikan di daerah amatlah

²⁶ Hasbullah, *op.cit.* h.36

mendasar peranannya, terutama pada lapisan yang terdekat dengan rakyat yang mendapat pelayanan.

Kesadaran masyarakat untuk mendukung otonomi bidang pendidikan diakui mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan otonomi bidang pendidikan di daerah, karena bagaimanapun masyarakat adalah subjek sekaligus objek pembangunan (termasuk bidang pendidikan) yang dicanangkan pemerintah dalam konteks meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, maka kebijakan pemerintah tidak akan berjalan dengan optimal sebagaimana seperti diungkapkan oleh anggota DPRD Kabupaten Siak yang penulis wawancarai²⁷ menurutnya masyarakat faktor terpenting dalam implementasi kebijakan pendidikan, peran serta masyarakat dapat menjadikan kebijakan otonomi pendidikan bisa berjalan seperti yang di harapkan.

Kesadaran masyarakat dalam konteks otonomi bidang pendidikan dapat dilakukan melalui kesediaannya mendukung program-program pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah daerah maupun pihak sekolah. Menurut Selamat Riyadi²⁸ saat ini masyarakat di daerah Kabupaten Siak secara umum mampu mendukung program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah maupun sekolah.

Pandangan yang berbeda di ungkapkan oleh kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak yang penulis

²⁷ Wawancara dengan Muhtarom, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Siak

²⁸ Wawancara dengan Selamat Riyadi....., *op.cit.*

wawancara²⁹ menurutnya masyarakat di daerah kecamatan sabak auh masih terdapat masyarakat yang kurang menyadari pentingnya mendukung program-program pemerintah maupun sekolah, sehingga mereka kurang peduli dengan program-program yang ada. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa program-program tersebut merupakan sepenuhnya tanggung jawab dari pemerintah daerah dan sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait dalam pelaksanaan program-program tersebut.

c. Sekolah

Dalam pelaksanaan otonomi pendidikan sekolah harus berusaha keras untuk dapat melayani tuntutan masyarakat pemakai jasa pendidikan. Perlu di ketahui bahwa fokus pelayanan atau pengabdian sekolah bukan untuk birokrasi, melainkan demi masyarakat yang dilayaninya, khususnya orang tua dan peserta didik. berdasarkan hasil wawancara penulis³⁰, pengelolaan sekolah yang baik merupakan faktor yang sangat mendukung tercapainya implementasi kebijakan otonomi bidang pendidikan sesuai dengan yang di harapkan karena sekolah merupakan instansi yang melaksanakan kebijakan otonomi bidang pendidikan ini.

Pandangan serupa juga di ungkapkan oleh kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sabak Auh³¹ sekolah yang di kelola dengan baik merupakan faktor yang sangat mendukung dalam implementasi

²⁹ Wawancara dengan Selamat Kepala UPTD....., *op.cit.*

³⁰ Wawancara dengan Selamat Riyadi,....., *op.cit.*

³¹ Wawancara dengan Selamat Kepala UPTD....., *op.cit.*

kebijakan otonomi pendidikan, berhasil tidaknya kebijakan otonomi pendidikan juga bisa di lihat dari sekolah yang menjalankan program-program yang telah dilaksanakan.

Sekolah yang bekerja tanpa memerdulikan masyarakat atau bekerja seenaknya, dengan sendirinya sekolah akan sulit mempertanggungjawabkan program-programnya. Jika demikian, sekolah akan ditinggalkan oleh masyarakat karena tidak dapat memenuhi harapan masyarakat. Masyarakat akan menilai mana sekolah yang bisa dipertanggungjawabkan dan mana yang tidak.

d. Keadaan Geografis

Pendidikan sangat erat kaitannya dengan sekolah, karena di sekolah itulah setiap kebijakan dapat di terapkan terkait masalah kurikulum dan lain sebagainya. Untuk membangun gedung sekolah tentunya diperlukan wilayah atau daerah yang sesuai dan kondusif untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Menurut Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sabak Auh yang penulis wawancarai³² mengatakan bahwa wilayah di daerah Kecamatan Sabak Auh masih luas dan masih mudah ditemukan untuk pembangunan gedung yang sesuai untuk digunakan dalam proses belajar mengajar.

Sejalan dengan pendapat diatas kepala sekolah yang penulis wawancarai³³ mengatakan bahwa di daerah terasebut sebagian besar sekolah berada di tempat yang kondusif dan sangat mendukung untuk

³² Wawancara dengan Selamat, kepala UPTD *op.cit.*

³³ Wawancara dengan Ramli, Kepala Sekolah SDN 006 Desa Sungai Tengah *op.cit.*

dilakukan proses belajar mengajar karena wilayah sekolah mudah tidak terlalu jauh dari rumah warga dan jauh dari keramaian yang dapat mengganggu proses belajar mengajar.

e. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam dunia pendidikan merupakan hal paling mendasar yang diperlukan. Baik sumber daya manusia aparatur pemerintahan yang menangani bidang pendidikan maupun sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan haruslah mempunyai kapasitas intelektual yang memadai sehingga implementasi kebijakan otonomi pendidikan dapat berjalan sesuai harapan.

Menurut hasil wawancara³⁴ bahwa sumber daya manusia di Kabupaten Siak sebagian besar telah sesuai dengan harapan walaupun harus diakui masih terdapat sebagian kecilnya belum memenuhi standar terutama di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, tetapi dengan adanya program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pihak kabupaten siak mempunyai keyakinan bahwa dalam beberapa tahun kedepan bidang masalah tersebut dapat di atasi.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Kepala UPTD Pendidikan yang penulis wawancarai³⁵, bahwa di daerah Kecamatan Sabak Auh sebagian besar sumber daya manusia yang berkaitan dengan masalah pendidikan mampu menjalankan tugasnya dengan baik

³⁴ Wawancara dengan Selamat Riyadi, Bidang*op.cit.*

³⁵ Wawancara dengan Selamat, Kepala UPTD. *Op.cit.*

terutama sumber daya manusia di bidang pendidik dan tenaga pendidikan.

2. Faktor-faktor Penghambat

Untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan secara merata di dalam suatu wilayah bukan merupakan hal yang mudah. Karena setiap daerah mempunyai karakteristik tersendiri. Dalam hal ini, tentu banyak ditemui kendala-kendala dalam mengimplementasikan suatu program yang telah di susun. Begitu juga dengan yang terjadi di Kabupaten Siak tepatnya di Kecamatan Sabak Auh berikut ini beberapa kendala yang di temui dalam implementasi kebijakan otonomi bidang pendidikan di daerah tersebut :

1. Peraturan Perundang-undangan

Pengaturan otonomi daerah dalam bidang pendidikan secara tegas telah dinyatakan dalam PP No. 38 Tahun 2007 yang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Semua urusan pendidikan di luar urusan kewenangan pemerintah pusat dan provinsi tersebut sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota. Ini berarti bahwa tugas dan beban pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menangani layanan pendidikan amat besar dan berat, terutama bagi daerah yang kemampuan diri (capacity building) dan sumber daya pendidikannya kurang.

Mengenai masalah peraturan perundang-undangan ini, menurut anggota DPRD yang penulis wawancarai³⁶ membenarkan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pendidikan di Kabupaten Siak belum di atur secara spesifik atau belum diatur dengan Peraturan Daerah (Perda), dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 5 Tahun 2008³⁷ Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Siak di sebutkan “penetapan kebijakan operasional pendidikan di Kabupaten Siak sesuai dengan kebijakan Nasional dan Provinsi ”.

Pandangan senada juga di ungkapkan Selamat Riyadi³⁸, peraturan perundang-undangan dapat juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan. Menurutnya peraturan yang di buat secara spesifik dan sesuai dengan kebutuhan daerah maka suatu kebijakan yang akan dilaksanakan akan sedikit mengalami kendala, hal ini tidak terjadi untuk daerah Kabupaten Siak karena Kabupaten Siak masih menggunakan peraturan Nasional dan peraturan Provinsi dalam menjalankan kebijakan pendidikan ini.

2. Sarana dan Prasarana

Masalah sarana dan prasarana merupakan masalah yang paling penting dalam dunia pendidikan, karena sarana dan prasarana merupakan hal yang bersentuhan langsung dengan peserta didik dalam

³⁶ Wawancara dengan Muhtarom, Ketua Komisi I DPRD....., *op.cit.*

³⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 5 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Siak

³⁸ Wawancara dengan Selamat Riyadi....., *op.cit.*

proses belajar mengajar. Implementasi kebijakan otonomi pendidikan juga tidak bisa berjalan dengan baik jika sarana dan prasarana dalam dunia pendidikan yang dalam hal ini adalah sarana dan prasarana yang ada di sekolah tidak dipenuhi sesuai dengan kebutuhan sekolah itu sendiri.

Menurut kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sabak Auh yang penulis wawancarai,³⁹ sarana dan prasarana yang ada di daerah tersebut masih menjadi kendala utama dan belum mampu mengoptimalkan pelaksanaan otonomi bidang pendidikan di daerah tersebut. Masih terdapat beberapa sekolah di daerah tersebut belum terpenuhi sarana dan prasarana secara maksimal.

Pandangan tersebut juga di benarkan oleh kepala sekolah yang penulis yang penulis wawancarai,⁴⁰ menurutnya sarana dan prasarana yang baik yang terpenuhi sesuai standar pembelajaran dapat mempermudah proses pembelajaran dan secara tidak langsung tujuan dari kebijakan otonomi pendidikan dengan mudah dapat tercapai.

Pandangan senada dikemukakan oleh kepala sekolah yang penulis wawancarai,⁴¹ menurutnya terpenuhi sarana dan prasarana dalam dunia pendidikan merupakan syarat utama untuk tercapainya pendidikan yang sesuai dengan tujuan didesentralisasikannya pendidikan itu sendiri.

³⁹ Wawancara dengan Selamat, Kepala UPTD*op.cit.*

⁴⁰ Wawancara dengan Ramli, Kepala Sekolah SDN 006 Sungai Tengah,*op.cit.*

⁴¹ Wawancara dengan Sumarno, Kepala Sekolah SDN 004 Desa Sabak Permai,

3. Masalah Koordinasi

Masalah koordinasi antar lembaga merupakan masalah yang tidak penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, begitu juga dengan kebijakan otonomi pendidikan ini. Menurut Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sabak Auh mengatakan bahwa bahwa koordinasi antar lembaga merupakan faktor yang mempengaruhi dalam otonomi pendidikan ini baik koordinasi antar instansi-instansi pendidikan maupun koordinasi dengan badan legislatif sebagai pembuat kebijakan itu sendiri.

Pandangan senada juga di ungkapkan oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Siak seringkali pihak dinas terkait belum melakukan koordinasi yang baik dengan badan legislatif sebagai pembuat kebijakan terkait dengan pendidikan di daerah itu sendiri.⁴²

Begitu juga dengan kepala sekolah yang penulis wawancarai, menurutnya pihak dinas sering terlambat dalam menginformasikan segala bentuk informasi yang dibutuhkan oleh pihak sekolah baik mengenai peraturan maupun dalam perkembangan kurikulum terbaru. Hal ini juga menurutnya dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan otonomi pendidikan itu sendiri.

Meskipun desentralisasi sudah ada dalam peraturan dan regulasi otonomi daerah, tetapi dalam kelembagaan dan sikap akademik guru, kepala sekolah dan jajaran dinas pendidikan sebagai atasannya belum

⁴² Wawancara dengan Muhtarom, . . . *op.cit*

sinkron. Pemerintah daerah belum menunjukkan penampilan dan cara kerja yang jelas, yang mereka lakukan masih pemanfaatan dana bukan bagaimana meningkatkan aktifitas pendidikan.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan otonomi pendidikan di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak masih menemui berbagai kendala meskipun di barengi dengan faktor-faktor yang mendukungnya. Beberapa hal yang menjadi kendala adalah terutama masalah peraturan perundang-undangan, masalah koordinasi antar pihak dan sarana dan prasarana yang belum lengkap dan memadai sehingga implementasi kebijakan otonomi bidang pendidikan belum tercapai secara optimal.

4. Masalah Birokrasi

Birokrasi yang baik dapat mempermudah dalam penerapan sebuah kebijakan tidak terkecuali dalam bidang pendidikan, sebaliknya birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dapat menjadi penghalang berhasilnya sebuah kebijakan. Menurut hasil wawancara⁴³ pembangunan sarana dan prasarana pendidikan seringkali terhambat oleh birokrasi yang panjang begitu juga dalam masalah peraturan-peraturan dalam proses lelang dalam pembangunan sarana pendidikan sering mengalami hambatan.

⁴³ Wawancara dengan Muhtarom, Anggota DPRD*op.cit.*

Sesuai dengan pandangan di atas Kepala UPTD pendidikan yang penulis wawancarai⁴⁴ mengatakan bahwa pihaknya sering kali menemui kesulitan dalam masalah birokrasi terutama terkait masalah pencairan dana oleh oleh pihak-pihak terkait hal ini menurutnya juga dapat menghambat tercapainya otonomi pendidikan sesuai yang diharapkan oleh kita semua.

⁴⁴ Wawancara dengan Selamat, kepala UPTD Pendidikan. *op.cit.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini ditandai dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah-sekolah masih belum terpenuhi secara lengkap dan memadai baik dalam hal sarana dan prasarana penunjang secara langsung proses pendidikan maupun sarana dan prasarana yang secara tidak langsung berkaitan proses pendidikan. Sehingga implementasi kebijakan otonomi bidang pendidikan tidak dapat berjalan secara optimal.
2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung implementasi kebijakan otonomi bidang pendidikan di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak adalah keseriusan pemerintah daerah dalam mengembangkan dunia pendidikan, partisipasi masyarakat dalam membangun fasilitas, dan pihak sekolah yang mampu berkembang secara mandiri sedangkan faktor-faktor penghambat implementasi ini adalah masalah perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan di daerah kabupaten siak, masalah sarana

dan prasarana pendukung pendidikan dan masalah koordinasi antar instansi yang terkait dengan masalah pendidikan.

B. Saran

Dari pemaparan di atas, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan penulis untuk berbagai pihak sehubungan dengan kebijakan otonomi bidang pendidikan, yaitu :

1. Kepada pemerintah daerah kabupaten siak di harapkan bisa menganggarkan secara merata kepada setiap daerah-daerah supaya terpenuhinya sarana dan prasarana dalam sekolah-sekolah yang ada, sehingga setiap sekolah dapat terpenuhi kebutuhan dalam bidang pendidikan secara lengkap dan memadai sehingga proses implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk lembaga-lembaga yang terkait dengan pendidikan di harapkan mampu bekerja lebih maksimal lagi untuk tercapainya implementasi kebijakan otonomi pendidikan ini sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk masyarakat diharapkan dapat mendukung sepenuhnya program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan tentunya yang tidak menyimpang dari peraturan yang ada

2. Untuk mengatasi hambatan yang ditemui dalam implementasi kebijakan otonomi bidang pendidikan ini pihak legislatif supaya lebih giat lagi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sehingga daerah kabupaten siak memiliki peraturan terkait pendidikan yang mengatur pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerahnya, kemudian seluruh pihak-

pihak yang terkait dengan pendidikan hendaknya melakukan koordinasi secara intensif sehingga kebijakan yang di buat dapat cepat terlaksana tentunya sesuai dengan yang harapkan sehinnga kebijakan otonomi daerah dalam bidang pendidikan yang di limpahkan kepada daerah dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Syahid, *desentralisasi pendidikan*, (Ciputat, Logos Wacana Ilmu, 2003)
- Achmad Syahid, *Reformasi Pendidikan*, (Ciputat, Logos Wacana Ilmu, 2003)
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung, Pustaka Setia, 2008)
- Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU, *Buku Panduan Akademik (Bimbingan Penyusunan Skripsi)*, 2011
- Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2005).
- H.A.R. Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002)
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010)
- HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2007)
- HAW Wijaya, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2002)
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta, Visimedia, 2007)
- J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002)
- Josef Karo, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2002)
- Kadi Dkk, *Otonomi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah*, (Ponorogo, STAIN PO Press, 2009)
- Kuncoro Mudrajat, *Otonomi dan Pembangunan daerah*, (Jakarta, Erlangga, 2004)
- Kabupaten Siak, *lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2008*

M. Sirozi, *Politik Pendidikan*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2007)

Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi*, (Jakarta, Kencana, 2009)

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2005)

Sam M. Chan, Tuti T. Sam, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, (Jakarta Rineka Cipta, 2007),

Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008)

Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011)